

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
INTISARI	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris	17
B. Tinjauan Umum Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).....	24
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	28

BAB III. METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Sifat Penelitian	39
C. Bahan Penelitian	40
D. Lokasi Penelitian dan Subyek Penelitian	45
E. Cara Pengumpulan Data dan Alat Pengumpulan Data..	48
F. Jalannya Penelitian	49
G. Analisis Data	50
BAB IV. PEMBAHASAN	52
A. Urgensi Pengaturan Notaris dan PPAT sebagai Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	52
1. Latar belakang dan Dasar Hukum Penetapan Notaris dan PPAT sebagai Pihak Pelapor Transaksi Keuangan Mencurigakan Pengguna Jasa.....	52
2. Materi dan Bentuk, Tata Cara Laporan Profesi Notaris dan PPAT Terkait Transaksi Keuangan Mencurigakan Pengguna Jasa.....	61
a. Pihak-pihak yang Terkait dengan Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi khususnya Notaris dan PPAT.....	62
b. Materi / isi Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Pengguna Jasa	65
c. Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan	

Mencurigakan kepada PPATK Menurut PerKa. PPATK Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi	81
B. Kedudukan Notaris dan PPAT Dalam Menyikapi Ketentuan Wajib Lapor Transaksi Keuangan Mencurigakan Pengguna Jasa terkait TPPU.....	101
1. Implementasi Ketentuan Wajib Lapor TKM Pengguna Jasa Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang	101
a. Pelaksanaan Wajib Lapor TKM Pengguna Jasa oleh Notaris dan PPAT di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman	101
b. Tanggapan, Pengurus Wilayah IPPAT DIY, Pengurus Daerah IPPAT Kota Yogyakarta dan Pengurus Daerah IPPAT Kabupaten Sleman terkait ketentuan wajib lapor transaksi keuangan mencurigakan tindak pidana pencucian uang Pengguna Jasa	116
c. Tanggapan Pengurus INI DIY, Pengda INI Kota Yogyakarta dan Pengda INI Kabupaten Sleman Terkait ketentuan wajib lapor transaksi keuangan mencurigakan tindak pidana pencucian uang Pengguna Jasa.....	120
2. Kedudukan Hak Ingkar Notaris dan Kewajiban Merahasiakan PPAT Terkait Wajib Lapor Transaksi	

Keuangan Mencurigakan Pengguna Jasa.....	123
3. Perlindungan Hukum Profesi Notaris dan PPAT terkait Pelaksanaan Ketentuan Wajib Laportransaksi	
Keuangan Mencurigakan Pengguna Jasa.....	137
BAB V. PENUTUP	145
a. Kesimpulan	145
b. Saran	147

DAFTAR PUSTAKA